

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Kecil Menengah (UKM) memegang peran sentral dalam perekonomian Indonesia. Data tahun 2009 menyebutkan bahwa jumlah UKM di Indonesia mencapai lebih dari 52 juta atau 99,99% dari jumlah total unit bisnis yang ada. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan data bahwa UKM menjadi penyedia kesempatan kerja bagi 91,8 juta orang atau 97,30%.

Usaha kecil menengah atau biasa disingkat UKM telah teruji mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda perekonomian global. Terlihat dari data mengenai penyerapan tenaga kerja di UKM. Penyerapan tenaga kerja di UKM meningkat sebesar 2,33% dari tahun 2008. Pada tahun yang sama, usaha besar justru mengalami penurunan penggunaan tenaga kerja sebesar 2,96%. Dari data yang dimiliki Departemen Dagang, berkat UKM perekonomian nasional masih tumbuh secara positif. Di saat kondisi ekonomi tak terkendali, perekonomian Indonesia tetap tumbuh walau hanya sebesar 3-4% karena 90% kegiatan usaha di Indonesia ditopang oleh UKM.

Usaha Kecil Menengah (UKM) ini merupakan istilah yang mengacu pada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (Duaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kriteria usaha kecil dan menengah menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Duaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).
3. Milik Warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.

Jumlah UKM meningkat sebesar 2,64% dari tahun 2008. Peningkatan jumlah UKM tersebut menyebabkan tingkat persaingan yang lebih tinggi sehingga memunculkan beberapa permasalahan bisnis yang lebih kompleks. Persaingan yang ketat menuntut UKM untuk lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selain itu, terdapat pula permasalahan-permasalahan lain yang harus dihadapi, seperti keterbatasan tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Secara lebih spesifik, masalah yang dihadapi, antara lain: kelemahan dalam memperoleh peluang pangsa pasar, permodalan dan keterbatasan di bidang SDM. Terdapat prioritas permasalahan (Kuncoro dalam Kuncoro, 2000) sebagai berikut:

1. Masalah karena belum adanya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

2. Masalah memperoleh pinjaman baik dari bank maupun modal ventura karena kebanyakan pengusaha kecil mengeluhkan berbelitnya prosedur untuk mendapatkan kredit, agunan yang tidak memenuhi syarat dan tingkat bunga yang dinilai terlalu tinggi.
3. Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat.
4. Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen yang cepat berubah.
5. Masalah memperoleh bahan baku, terutama jika terjadi persaingan yang ketat dalam memperoleh bahan baku, bahan baku berkualitas rendah dan tingginya harga bahan baku.
6. Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi.
7. Masalah tenaga kerja karena sulitnya memperoleh tenaga kerja yang terampil.

Permasalahan-permasalahan di atas dapat diatasi atau dikurangi dengan cara menjaga efisiensi dan efektifitas perusahaan. Efektifitas dan efisiensi sangat erat hubungannya dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pengendalian internal membantu manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya perusahaan. Manajemen dapat menggunakan pengendalian internal untuk merencanakan dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan. Pengendalian internal juga mengurangi kesalahan, ketidakefisienan, ketidakefektifan serta kecurangan

yang mungkin terjadi. UKM dituntut untuk melakukan pengendalian internal dengan baik untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Selain itu, pengendalian internal juga dapat menghasilkan masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Manajemen bertanggung jawab untuk membentuk suatu lingkungan pengendalian pada perusahaannya. Hal ini merupakan bagian tanggung jawab mereka dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Manajemen pada perusahaan harus memahami pentingnya menerapkan dan memelihara pengendalian internal secara efektif yang merupakan tanggungjawabnya.

Definisi COSO tentang pengendalian intern adalah suatu proses yang dilakukan oleh komisaris/pemilik, manajemen dan karyawannya yang didesain untuk memberikan jaminan atas efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, laporan keuangan yang andal dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Definisi tersebut memperjelas bahwa pengendalian internal bukan hanya mempengaruhi laporan keuangan yang *reliable* tetapi juga menunjukkan bahwa pengendalian seharusnya efektif untuk semua kegiatan operasi. Dalam definisi tersebut juga dijelaskan bahwa pengendalian internal dilakukan oleh seluruh jajaran direksi, manajemen dan karyawan. Pengendalian internal bukan merupakan tanggung jawab suatu fungsi khusus.

Kerangka kerja COSO terdiri dari:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan

Pengendalian internal di UKM masih lemah, berbeda dengan pengendalian internal di perusahaan besar. Perusahaan besar sudah menerapkan pengendalian internal secara konsisten. Dalam hal manajerial, sebagian besar pemilik UKM berposisi sebagai manajemen perusahaan. Seharusnya UKM bisa menerapkan pengendalian internal sebaik yang diterapkan perusahaan-perusahaan besar untuk memperoleh manfaatnya.

Meskipun banyak hal yang bisa diteliti dari pengendalian internal UKM, namun studi mengenai penerapan pengendalian internal di UKM masih sangat sulit diperoleh. Studi ini akan memotret praktek pengendalian internal yang dilakukan UKM di Yogyakarta. Dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner yang dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA) mengenai aktivitas pengendalian internal. *Institute of Internal Auditors* (IIA) adalah salah satu organisasi yang mendanai COSO, sehingga kuesioner yang dikeluarkan IIA sangat berhubungan dengan COSO. Kuesioner yang dikeluarkan oleh IIA berdasarkan pada *best practices* dengan standar internasional. Semakin tinggi skor atas jawaban kuesioner maka praktek pengendalian internal yang dilakukan semakin mendekati standar.

Selain itu, penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada frekuensi pelaksanaan pengendalian internal. IIA mengeluarkan kuesioner dengan standar kualitas audit yang diukur berdasarkan prosesnya. Kualitas diukur dengan frekuensi melakukan aktivitas-aktivitas pengendalian.

Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kompetensi dan independensi. AAA Financial Accounting Commite dalam Elfarini (2007) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Penelitian Sukriah, Akram dan Inapty (2009) mengenai pengalaman kerja dan kompetensi memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh positif antara pengalaman kerja dan kompetensi dengan kualitas hasil pemeriksaan. Manajemen yang kompeten di suatu perusahaan akan dengan mudah memahami entitas yang menjadi obyek pekerjaannya sehingga dapat memperoleh informasi yang relevan, sehingga manajemen dapat mendeteksi permasalahan kemudian memberikan rekomendasi untuk menghilangkan atau memperkecil penyebabnya.

Mayangsari (2003) menyebutkan bahwa auditor yang memiliki keahlian dan independen memberikan pendapat tentang kelangsungan hidup perusahaan yang cenderung lebih benar dibandingkan auditor yang hanya memiliki salah satu karakteristik atau sama sekali tidak memiliki keduanya. Kompetensi meliputi banyak keahlian yang harus dimiliki manajemen untuk melakukan pengendalian internal.

Independensi merupakan standar umum nomor 2 dalam standar auditing yang ditetapkan IAI. Didalamnya menyatakan bahwa semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan. Tingkat independensi dari pihak yang melakukan pengendalian internal merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas audit internal.

Pihak yang melakukan pengendalian internal harus independen sehingga pengendalian internal dapat berjalan dengan obyektif tanpa berpihak kepada siapapun.

Studi eksplorasi mengenai kualitas pengendalian internal masih tergolong jarang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini ingin melihat praktek pengendalian internal yang dilakukan di perusahaan kecil dan menengah. Penelitian ini akan menggambarkan praktek pengendalian internal pada perusahaan kecil dan menengah. Selain itu, penelitian ini ingin mengetahui kualitas pengendalian internal UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup penelitian yang hanya meneliti salah satu dari kerangka kerja COSO, yaitu aktivitas pengendalian internal. Pengendalian internal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas pengendalian internal. Studi ini hanya sebatas meneliti pengendalian internal yang fokus pada aktivitasnya. Dalam penelitian ini, internal audit tidak hanya dibatasi dalam konteks kelembagaan, tetapi juga pada aktivitas yang dilakukan internal auditi. Penelitian ini hanya melihat pengaruh kompetensi dan independensi terhadap aktifitas pengendalian internal.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini merupakan studi *exploratory* tentang praktek pengendalian internal di UKM dan juga sekaligus meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian internal, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pengendalian internal UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas pengendalian internal UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas pengendalian internal UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal mengenai pengendalian internal di UKM, antara lain:

1. Memperoleh gambaran mengenai praktek pengendalian internal UKM di Yogyakarta.
2. Mengetahui apakah kompetensi mempunyai pengaruh terhadap kualitas pengendalian internal UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui apakah independensi mempunyai pengaruh terhadap kualitas pengendalian internal UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan di bidang teoritis dan praktis, yaitu:

1. Teoritis

- a. Memberikan pengembangan pada teori-teori akuntansi dan audit.
- b. Memberikan tambahan literatur mengenai Kualitas Pengendalian Internal.
- c. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas pengendalian internal.

2. Praktis

- a. Memberikan pemahaman mengenai praktek pengendalian internal yang terjadi di perusahaan kecil dan menengah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Memberikan gambaran mengenai praktek pengendalian internal yang dilakukan pada perusahaan kecil dan menengah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Dasar untuk meningkatkan pengendalian internal agar dapat perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.